

## **BAB II**

### **DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

#### **2.1. Aparatur Pemerintah Desa**

Secara umum, "pemerintah" mengacu pada kelompok orang dengan kemampuan hukum untuk bertindak dengan cara yang melindungi dan mengoptimalkan mutu hidup penduduk melalui perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Tugas pemerintah adalah menyelenggarakan fungsi administrasi publik yang meliputi fungsi regulasi, *service*, pembangunan, perizinan, dan pemeliharaan. Hal itu tertuang dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik, dan juga dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Administrasi Publik:

“Mengenai desa dijelaskan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.”

Pemerintah desa mempunyai peran dalam mendorong keterlibatan masyarakat untuk kesejahteraan yang bersifat ajakan dalam membangun, merancang, dan memajukan potensi masyarakat dalam menggunakan sumber daya manusia (SDM). SDM bisa menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa juga dalam hal mengelola keuangan desa atau dana desa, serta melaksanakan pembangunan jika sudah sesuai dengan tujuan dan perannya dalam masyarakat

##### **2.1.1. Kinerja Aparatur pemerintah Desa**

Desa memiliki wewenang, hak, serta kewajiban untuk menunaikan segala sistem organisasi di pemerintah desa baik segi pengelolaan keuangan, peraturan hukum, dan aset serta meningkatkan sumber daya manusianya. Kinerja pada instansi pemerintahan desa saat ini cukup menarik perhatian publik dengan semakin tingginya kesadaran masyarakat terhadap penyelenggaraan administrasi publik.

Kinerja dalam bahasa Inggris diartikan, dengan kata *Performance* yang mempunyai arti pelaksanaan, Manfaat dari pengukuran kinerja adalah memberi pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen, memberi arahan agar tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan, dan untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkannya dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja (Sari, 2018).

Menurut penjelasan (Lubis, 2020), kinerja merupakan pencapaian dari suatu usaha entah itu berhasil atau tidak sesuai dengan tujuan dari organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja sektor publik bukan hanya bagaimana kemampuan uang publik dibelanjakan. Namun pengukuran kinerja sektor publik dilaksanakan untuk menilai pencapaian organisasi melalui alat ukur keuangan dan keuangan.

Perkembangan dari suatu desa dapat mencerminkan bagaimana kinerja pemerintah desa telah dijalankan. Menurut Aang (2018) Kinerja pemerintah desa/organisasi adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan, serta visi misi pemerintah desa/organisasi yang telah ditentukan selanjutnya.

Terwujudnya suatu visi organisasi tidak bisa dipisahkan dari sumber daya yang ada dalam organisasi yang dijalankan oleh karyawan yang bertugas aktif dan mempunyai peran sebagai pelaku yang bertujuan dalam upaya pencapaian tujuan organisasi tersebut.

### **2.1.2. Indikator Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Menurut Lubis (2020), menjelaskan bahwa indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan, dengan memperhitungkan indikator *inputs*, *output*, *outcomes*, *benefits*, dan *impacts*. Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efisien dan efektif atau untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja keseluruhan organisasi.

Kinerja dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap kegiatan selesai dan berfungsi. Dengan adanya indikator, suatu organisasi mempunyai wahana yang jelas bagaimana organisasi tersebut dikatakan berhasil atau tidak berhasil di mana mendatang. Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja.

Liu et al .,(2018) menjelaskan bahwa indikator “tingkat kinerja pegawai akan sangat tergantung pada faktor kemampuan pegawai itu sendiri seperti tingkat pendidikan, pengetahuan, pengalaman dimana dengan tingkat kemampuan yang semakin tinggi akan mempunyai kinerja semakin tinggi pula. Dengan demikian tingkat pendidikan, pengetahuan dan pengalaman yang rendah akan berdampak negatif pada kinerja pegawai”.

## **2.2. Kualitas Sumber Daya Manusia**

Aparatur desa yakni SDM yang dituntut harus bekerja, menyediakan diri dalam pelayanan untuk masyarakat dan memberikan hasil adanya pembaharuan kinerja dalam instansi pemerintah. Sesuai dengan perannya masing-masing, perangkat desa diharapkan mampu meningkatkan standar sumber daya manusia dari berbagai disiplin ilmu.

Menurut Werther dan Davis (2018), Sumber daya manusia merupakan karyawan yang bersedia dan berkompeten dalam mewujudkan visi misi organisasi, yang mana hal ini berkaitan dengan adanya dimensi inti dari sumber daya yakni kontribusi SDM yang akan menjadi patokan dalam keberlangsungan kualitas dan kapabilitas.

### **2.2.1. Indikator Kualitas Sumber Daya Manusia**

Karinda (2018), menyatakan bahwa program pelatihan dan pendidikan dapat digunakan untuk meningkatkan standar sumber daya manusia (SDM) guna mencapai hasil yang diinginkan:

### 1. Pengetahuan

Pengetahuan yakni informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Pengetahuan pegawai turut menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Namun tidak semua pegawai memiliki pengetahuan yang cukup akan meningkatkan efisiensi perusahaan, sehingga operasional akan tersendat-sendat. Pengetahuan mencerminkan kemampuan kognitif seorang karyawan berupa kemampuan untuk mengenal, memahami, menyadari dan menghayati suatu tugas dan pekerjaan. Karena itu, pengetahuan seseorang karyawan dapat dikembangkan melalui pendidikan, baik formal maupun non formal serta pengalaman. Pendidikan memberikan dasar pengetahuan, teori, logika, kemampuan analisis serta pengembangan watak dan kepribadian.

### 2. Pelatihan

Proses peningkatan keterampilan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan melalui pendidikan dan pelatihan. Pelatihan yang baik, harus berkaitan dengan keahlian dengan keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaannya. Pelatihan adalah usaha untuk memperbaiki performa pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi tanggung jawabnya, atau satu pekerjaan yang ada kaitannya dengan pekerjaannya.

### 3. Keterampilan

Keterampilan berarti kemampuan untuk mengoperasikan suatu pekerjaan secara mudah dan cepat yang membutuhkan kemampuan dasar. Keterampilan merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. Keterampilan merupakan perilaku yang terkait tugas, yang bisa di kuasai melalui pembelajaran, dan bisa

ditingkatkan melalui pelatihan dan bantuan orang lain. Keterampilan yang baik sangat penting untuk meningkatkan kinerja pegawai.

#### 4. Pengalaman

Pengalaman merupakan segala hal yang pernah dialami atau dilalui seseorang dalam melaksanakan kewajiban dan tugas selama hidupnya. Keahlian seorang aparatur memerlukan pengalaman mengorganisasi orang, komunikasi di hadapan kelompok, menyelesaikan masalah dan sebagainya. Aparatur yang tidak pernah berhubungan dengan organisasi besar dan kompleks tidak mungkin mengembangkan kecerdasan organisasional untuk memahami dinamika kekuasaan dan pengaruh dalam lingkungan tersebut.

SDM menjadi salah satu bagian yang paling krusial dalam pelaksanaan kinerja pemerintahan. Variabel tersebut bisa diukur dengan media kuesioner dari penelitian sebelumnya (Lubis 2020).

### 2.3. Pemanfaatan Teknologi

Pemanfaatan teknologi informasi yaitu dengan memanfaatkan komputer, merupakan kebutuhan yang penting dalam mendukung aparatur desa untuk memudahkannya dalam pengelolaan dokumen-dokumen desa secara menyeluruh. Pemanfaatan komputer tersebut dinilai mempunyai kelebihan dalam perihal akurasi dan ketepatan hasil operasi data sehingga akan meminimalisir adanya risiko terhadap kesalahan yang terjadi. Pemanfaatan perangkat lunak sebagai piranti pendukung dalam sistem akuntan dan keuangan daerah adalah salah satu wujud pemanfaatan teknologi informasi. Oleh sebab itu, membutuhkan adanya sistem yang mampu mengelola keuangan daerah secara disiplin waktu, terbuka, akurat, dan juga akuntabel Yulianti *at al*(2018). Manusia memiliki kemampuan untuk menghasilkan, mengubah, menyimpan, mengkomunikasikan, dan/atau menyebarkan informasi, yang digunakan dalam teknologi informasi. Penciptaan banyak teknologi baru telah secara signifikan memajukan ilmu pengetahuan di semua disiplin ilmu yang ada sekarang, termasuk sektor publik Rini (2019).

### 2.3.1. Indikator Pemanfaatan Teknologi

Menurut Lubis (2020), yang dilakukan oleh pemerintah desa terdiri atas beberapa dimensi dan indikatornya:

#### 1. Penggunaan *Software* aplikasi

Kewajiban penggunaan aplikasi untuk meningkatkan kinerja pemerintah desa, salah satunya penggunaan aplikasi SISKEUDES, dimana penggunaan ini nanti dapat mengelola, memproses, mendapatkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, akurat, dan tepat waktu.

#### 2. Proses akuntansi secara komputerisasi

Dengan adanya komputer sebagai penunjang operasional diharapkan mampu mengurangi kesalahan dalam proses data, sehingga menghasilkan laporan keuangan yang andal.

#### 3. Laporan akuntansi dan manajerial yang terintegrasi

Semakin besar pemanfaatan teknologi informasi maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah semakin baik pula. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimaksud seperti penggunaan komputer dan perangkat lunak secara optimal, akan berdampak pada pemrosesan transaksi yang lebih cepat dan perhitungannya juga akan memiliki tingkat keakuratan yang tinggi sehingga akan berujung pada peningkatan kualitas pelaporan keuangan yang tepat waktu karena pemanfaatan teknologi akan mengurangi kesalahan yang bersifat material.

#### 4. Pegawai mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Penggunaan komputer yang baik juga dapat membantu pemerintah desa meningkatkan pelayanan publik. Pegawai dapat mengoperasikan

komputer untuk mengembangkan aplikasi atau platform online yang memudahkan warga dalam mengakses layanan pemerintah.

5. Pegawai dapat memanfaatkan keunggulan komputer dalam menginput data secara cepat.

Dengan menguasai penggunaan komputer, pegawai dapat mengelola tugas administrasi dengan lebih cepat dan efisien.

#### **2.4. Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Transparan merupakan informasi mengenai keuangan secara terbuka dan jujur kepada masyarakat umum dengan alasan masyarakat juga memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam mengelola sumber daya publik. Hal ini didukung oleh Dalam Pasal 4 ayat 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia NO. 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dikatakan transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

Transparansi merupakan salah satu faktor terpenting demi terciptanya kinerja pemerintahan yang baik Kushartining *at al*, (2021). Transparansi adalah sebuah keterbukaan dimana pemerintah memberikan informasi terkait hal-hal yang perlu disampaikan ketika menjalankan tugas maupun kegiatannya. Atau dalam artian lain informasi dari suatu organisasi mudah untuk diakses oleh semua orang terutama bagi masyarakat individu atau kelompok yang bersangkutan dengan organisasi,( Novitasari & Asyik, 2019).

##### **2.4.1. Indikator Transparansi Pengelolaan Dana Desa**

Menurut M.Amin, ada beberapa indikator transparansi pengelolaan dana desa, yaitu:

1. Adanya musyawarah yang melibatkan masyarakat.  
Masyarakat berperan penting dalam transparansi pengelolaan keuangan desa.
2. Adanya akses informasi yang jelas mengenai perencanaan dan pelaksanaan.  
Masyarakat memiliki kemudahan dalam memperoleh dokumen informasi tentang pengelolaan keuangan desa.
3. Adanya akses informasi yang jelas mengenai pertanggungjawaban.  
Tersedianya informasi mengenai laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang tepat

## **2.5. Kerangka Konseptual**

### **2.5.1 Teori Agensi**

Teori agensi adalah suatu teori yang berfokus pada dua individu, yaitu *principal* (*principal*) dan *agen* (*agent*). Baik *principal* maupun *agen* akan diasumsikan sebagai orang-orang yang memiliki pemikiran yang rasional tentang sebuah motivasi kepentingan pribadi, yang juga memiliki kesulitan membedakan mana itu penghargaan atas preferensi, mana itu kepercayaan dan informasi. Teori keagenan adalah teori yang muncul dikarenakan adanya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Dalam teori keagenan ini diasumsikan bahwa individu-individu hanya semata-mata termotivasi karena adanya kepentingan bagi dirinya sendiri sehingga mengakibatkan timbulnya konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. *Principal* mengontrak *agent* untuk melakukan pengelolaan sumber daya dalam perusahaan dan berkewajiban untuk memberikan imbalan kepada *agent* sedangkan *agent* berkewajiban melakukan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan bertanggung jawab atas tugas yang dibebankan kepadanya, Jensen dan Meckling (1976).

Kaitan teori agensi dengan penelitian ini adalah teori agensi akan menerangkan hubungan *principal* dan *agent* pada sektor pemerintah desa. Pemerintah desa akan berperan sebagai *agent*, dan masyarakat berperan sebagai *principal*. Masyarakat akan memiliki hak untuk mengawasi dan meminta



pertanggungjawaban dari pemerintah atas sumber daya manusia yang telah digunakan, sedangkan pemerintah desa memiliki kewajiban untuk memegang amanah yang telah diberikan oleh masyarakat (*agent*). Pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah antara lain yaitu menyajikan, melaporkan, dan juga mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan tugasnya.

### **2.5.2. Hubungan Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Sumber daya merupakan bagian terpenting dalam mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera, sehingga peningkatan sumber daya manusia ini sangat dibutuhkan (Karinda,2018), Efisiensi dalam pemerintahan desa merupakan *output* dari kegiatan atau program yang dicapai atau tercapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dana desa, yang dapat diukur secara kuantitatif dan kualitatif. Efektivitas pelayanan yang ditawarkan kepada masyarakat dapat digunakan untuk mengukur kompetensi aparatur desa. Efektivitas pemerintahan desa juga dapat diukur dari kemampuannya menggali dan mengelola sumber daya keuangan desa untuk memenuhi kebutuhan pendanaan penyelenggaraan sistem politik, penyediaan layanan masyarakat, dan pembangunan desa tanpa sepenuhnya bergantung pada federal, sesuai dengan batasan hukum dan peraturan undang-undang.

### **2.5.3. Hubungan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Dengan perkembangan teknologi informasi diikuti zaman yang semakin pesat menuntut organisasi pemerintah termasuk pemerintah desa menggunakan teknologi informasi (Samukri et al., 2021). Pemanfaatan teknologi informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan pekerjaan hal ini merupakan salah satu upaya agar informasi dapat dengan mudah diperoleh.

Kewajiban pemanfaatan teknologi diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan

prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik.

Kewajiban Pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya yang dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi sebagai penunjang pekerjaan dan meningkatkan kinerja (Lubis, 2020). Hasil penelitian (Aziz *at al* 2019), juga menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Hasil Penelitian (Heri, 2019) Kemajuan teknologi yang kompleks berpotensi mempercepat kemajuan di banyak bidang masyarakat, tetapi juga dapat menjadi ancaman bagi banyak sektor publik. Perkembangan teknologi informasi saat ini tentunya dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap seberapa baik kinerja setiap sektor yang ada, tidak terkecuali pada sektor pemerintahan desa.

Teknologi informasi merupakan level dimana pemanfaatan teknologi bisa menghadirkan fungsi bagi orang yang memanfaatkannya dalam hal memajukan kinerja, seperti pada aparatur desa yang bisa mengoperasikan teknologi informasi secara mumpuni yang akan berpengaruh terhadap mutu dan peningkatan kinerja desa itu sendiri (Rezky Endriyani, 2021). Bisa dilihat bahwa adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi membuat adanya pengalihan terhadap gaya hidup dan perspektif masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Tidak bisa dipungkiri dalam aspek pemerintahan juga akan menyesuaikan untuk menggunakan teknologi informasi, seperti pemerintahan desa. Dengan demikian, dari uraian-uraian diatas, maka dapat diprediksi pemanfaatan teknologi berpengaruh terhadap kinerja Aparatur desa.

#### **2.5.4. Hubungan Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan informasi yang

tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau (M.Amin,2019). Keterbukaan informasi oleh para aparatur pemerintah secara memadai dan mudah dipahami dapat digunakan sebagai alat untuk memonitoring dan mengevaluasi hasil kinerja yang telah dilaksanakan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa transparan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Perundang-undangan

Transparansi harus terbuka pada setiap tindakan, siap menerima kritik maupun saran, dan juga dapat dipertanggungjawabkan (Ardiyanti, 2019). Uraian diatas dapat disimpulkan bahwa transparansi merupakan keterbukaan pemerintah kepada masyarakat untuk mengakses informasi berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah tersebut.

## **2.6. Penelitian Terdahulu**

### **2.6.1 Uraian Deskriptif**

Ada beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan untuk menguji kualitas sumber daya manusia terhadap kinerja pemerintah desa. Penelitian pertama dilakukan oleh (Karinda, 2018) dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Kepala Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Atenbnggai Kepulauan. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan hasil penelitian adalah Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung.

Penelitian kedua dilakukan oleh (lubis, 2020) dengan judul Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi terhadap Sistem pengelolaan dana desa serta dampak terhadap kinerja pemerintah desa di kabupaten Deli Serdang. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan hasil

penelitian bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, Sistem Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh (M.Amin, 2019) dengan judul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kinerja Keuangan Pemerintah Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah desa, Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa

**Tabel 2.1**

**Tabel Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Variabel/Analisa	Obyek/Sampel	Hasil
Karinda (2018)	<b>Variabel Independen (X):</b> X1 Kualitas Sumber Daya Manusia <b>Variabel Dependen</b> Y: Kinerja kepala desa	Pemerintah desa di Bongganan Kecamatan Tinangkung	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Kepala Desa di Desa Bongganan Kecamatan Tinangkung.

<p>Lubis (2020)</p>	<p><b>Variabel</b> <b>Independen:</b> X1 Sumber Daya Manusia X2 Pemanfaatan Teknologi <b>Variabel</b> <b>Dependen:</b> Y Kinerja Pemerintahan Desa Z Sistem Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Pemerintah desa di kabupaten Deli Serdang (2020)</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, Sistem Pengelolaan Dana Desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa, dan Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Sistem Pengelolaan Dana Desa, Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa, Pemanfaatan Teknologi berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintahan Desa Melalui Sistem Pengelolaan Dana Desa.</p>
-------------------------	---	---	---

<p>Tarjo (2020)</p>	<p><b>Variabel Penelitian:</b> X1 Kompetensi Sumber Daya Manusia X2 Pemanfaatan Teknologi informasi <b>Variabel Dependen:</b> Y Kinerja Pemerintah Desa</p>	<p>Pemerintah Desa di kabupaten Bungo</p>	<p>kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja aparatur desa .</p>
<p>M. Amin (2019)</p>	<p><b>Variabel Independen:</b> X1 Akuntabilitas X2 Transparansi <b>Variabel Dependen:</b> Y Kinerja Aparatur Pemerintah Z Kinerja Keuangan Pemerinta</p>	<p>Pemerintah Desa di Kabupaten Sidoarjo</p>	<p>Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, Akuntabilitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pemerintah desa, Transparansi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah, kinerja keuangan pemerintah berpengaruh positif terhadap kinerja aparatur pemerintah desa</p>

M. Amin (2019)	<b>Variabel Independen:</b> X1 Kinerja aparatur pemerintah desa X2 Pengawasan aparatur pemerintah desa <b>Variabel Dependen:</b> Y Transparansi Keuangan Desa	Pemerintah desa di Kabupaten Lombok Timur	kinerja aparatur dan pengawasan BPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap transparansi keuangan desa
Lubis (2020)	<b>Variabel Dependen:</b> Kinerja Aparatur Pemerintah Desa	Pemerintah desa di kabupaten Deli Serdang (2020)	Kinerja dapat dihitung dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi.

## 2.7. Pengembangan Hipotesis

### 2.7.1. Pengaruh kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa

SDM merupakan sumber daya lembaga yang penting dan diperhatikan selain sumber daya alam. SDM ini merupakan komponen krusial dalam pengelolaan dana desa, karena manusia sisi inisiatif dan kreativitas yang dibutuhkan. Sumber daya manusia adalah salah satu organ pemerintah desa, selain Kepala Desa, sesuai rumusan Pasal 1 angka 3 UU Desa, kedudukan Perangkat Desa



adalah ‘pembantu’ bagi Kepala Desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Hendri et al (2020).

Menurut Karinda (2018), Sumber daya manusia adalah tenaga kerja yang mampu mencapai tujuan dari visi dan misi organisasi. Agar tercapainya tujuan dari suatu organisasi diperlukan sumber daya manusia yang berpotensi dalam mengelola dana desa. Selanjutnya dikutip dalam penelitian Karinda (2018), meskipun teknologi terus maju setiap tahunnya dengan terobosan informasi yang semakin canggih, sumber daya manusia tetap dibutuhkan untuk memenuhi tujuan awal organisasi. Sehingga jika suatu pemerintahan desa memiliki sumber daya manusia yang berkualitas maka tugas tersebut akan terlaksana dengan lebih baik dan kita semua dapat merasakan manfaat dari hasil kinerja pemerintah tersebut.

Menurut Maenadi (2021) menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Hal ini menunjukkan bahwa mengenai produktivitas kerja yang meningkat dalam lingkup organisasi merupakan hal yang utama bersamaan dengan kompetensi karyawan sebagai SDM dalam suatu organisasi. Berdasarkan teori ini bisa ditarik kesimpulan bahwa kualitas SDM berpengaruh terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Ha1 = Kualitas Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

### **2.7.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, yang menyebutkan bahwa menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pemerintahan pusat dan uji berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan mempermudah penyampaian informasi keuangan ke publik. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah perlu

mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah bekerja secara terpadu dengan menyederhanakan akses antar unit kerja. Melalui pemanfaatan teknologi akan memberikan kemudahan kepada pihak pemerintah desa untuk memperoleh informasi kinerja yang telah ditetapkan.

Menurut Lubis (2020) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa. Hal ini menunjukkan teknologi informasi difungsikan untuk hal utama yaitu pengelolaan data. Dalam hal ini termasuk serangkaian dalam hal memproses, mengumpulkan, melakukan penyusunan, penyimpanan, dan pemanipulasian data yang bisa dijalankan dengan bermacam cara agar menghasilkan informasi yang berkualitas, terutama aktual dan relevan, serta dapat ditujukan untuk pribadi, profesional, dan pemerintahan. Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Ha2 = Teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah desa**

### **2.7.3 Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

Transparansi diterapkan agar penyelenggaraan pemerintah memberikan kesempatan kepada desa secara benar, jujur, dan tidak diskriminatif. Perwujudan transparansi sebagai amanat peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pemerintahan telah memberikan tekanan kepada aparatur desa untuk membuka diri terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi seluas- luasnya tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk mengetahui, memberi masukan, mengevaluasi serta menilai agar aparatur lebih hati-hati dalam bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan adanya transparansi yang diberikan oleh pemerintah membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dengan kinerja terbaiknya sehingga penilaian publik terhadap pemerintah menjadi positif.

Menurut Suwanti (2021) mengatakan bahwa transparansi dapat dilihat melalui dua hal yaitu, pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat dan upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Oleh karena itu hipotesis yang diajukan untuk diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

**Ha3 = Transparansi pengelolaan dana desa berpengaruh positif terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa**

